

2023

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**
T A H U N 2 0 2 3



**BIRO ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG/JASA**
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	1
1.3 Isu-Isu Strategis.....	6
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	7
1.5 Sistematika Penulisan	11
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	11
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	13
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	15
2.3 Perjanjian Kinerja	16
2.4 Instrument Pendukung Capaian Kinerja	17
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2 Efisiensi Anggaran	25
3.3 Inovasi	27
3.3 Penghargaan	28
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Rekomendasi	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	7
Tabel 1.2 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang .	7
Tabel 1.3 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	8
Tabel 1.4 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	8
Tabel 1.5 : Sarana dan Prasarana	9
Tabel 2.1 : Rencana Kinerja Jangka Menengah (Sebelum Perubahan).....	14
Tabel 2.2 : Rencana Kinerja Jangka Menengah (Setelah Perubahan).....	15
Tabel 2.3 : Rencana Kinerja	16
Tabel 2.4 : Arah Kebijakan	16
Tabel 2.5 : Perjanjian Kinerja	16
Tabel 2.6 : Program dan Kegiatan	17
Tabel 3.1 : Skala Pengukuran Kinerja	23
Tabel 3.2 : Sasaran Strategis dan Indikator	23
Tabel 3.3 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis TW IV 2023	23
Tabel 3.4 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 – 2023	24
Tabel 3.5 : Capaian Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	24
Tabel 3.6 : Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2023	25

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Cascading Biro APBJ	4
Gambar 1.2 : Kerangka Peta Proses Bisnis	5
Gambar 1.3 : Peta Proses Bisnis	5
Gambar 1.4 : Struktur Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	6
Gambar 2.1 : E-Controlling	17
Gambar 2.2 : E-Planning	18
Gambar 2.3 : SILALAP BAJA	18
Gambar 2.4 : SiRUP Lokal	19
Gambar 2.5 : E-Consult	19
Gambar 2.6 : Blangkon Jateng	20
Gambar 2.7 : SPSE...	20
Gambar 2.8 : SIMONBAJA	21
Gambar 3.1 : APIK LAKONI	27
Gambar 3.2 : Award 2023 (I2SPE)	28

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

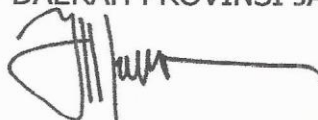
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja . 2023. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2024

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



YASIP KHASANI, S.IP.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19741219 199703 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 75 mengamanatkan dibentuknya lembaga barang jasa yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa. Tindak lanjut dari Perpres ini adalah adanya peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di dalam peraturan tersebut diamanatkan maksimal akhir Desember 2018 harus sudah terbentuk lembaga mandiri berupa Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Provinsi Jawa Tengah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa dengan nomenklatur Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa yang diatur didalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 Agustus 2018.

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

1. Mandat Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah bahwa Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dan diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021, Pasal 88, Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang

Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, Pelayanan Administratif dan Pembinaan Sumber Daya ASN di Bidang Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Administrasi Pengadaan Barang/Jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- e. pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi memiliki Kinerja Utama sesuai dalam RENSTRA SETDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang dipaparkan dalam Cascading Kinerja Utama seperti gambar dibawah ini:

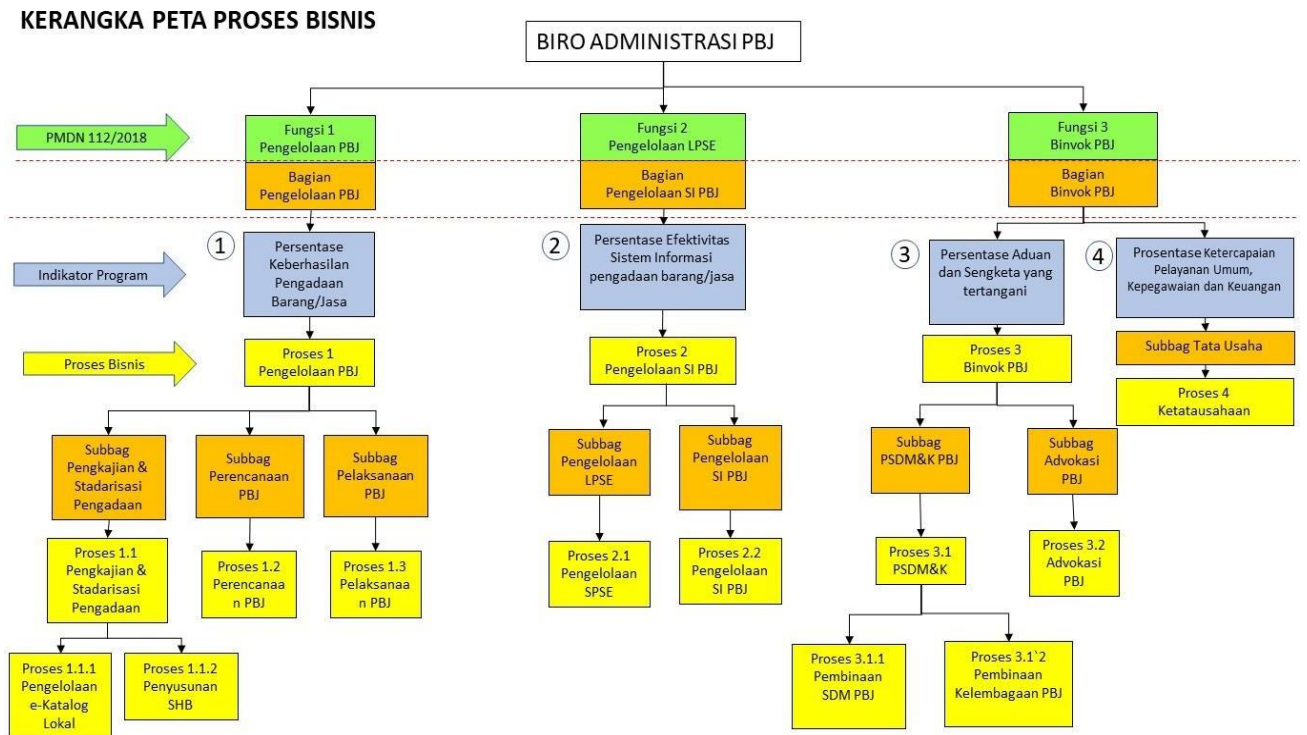
CASCADING KINERJA UTAMA
BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH SESUAI RENSTRA SETDA PROV JATENG
TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Idikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektifitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan
					Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
					Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
				Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
					Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa
					Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani
	Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
					Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
					Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah

Gambar 1.1 Cascading Biro APBJ

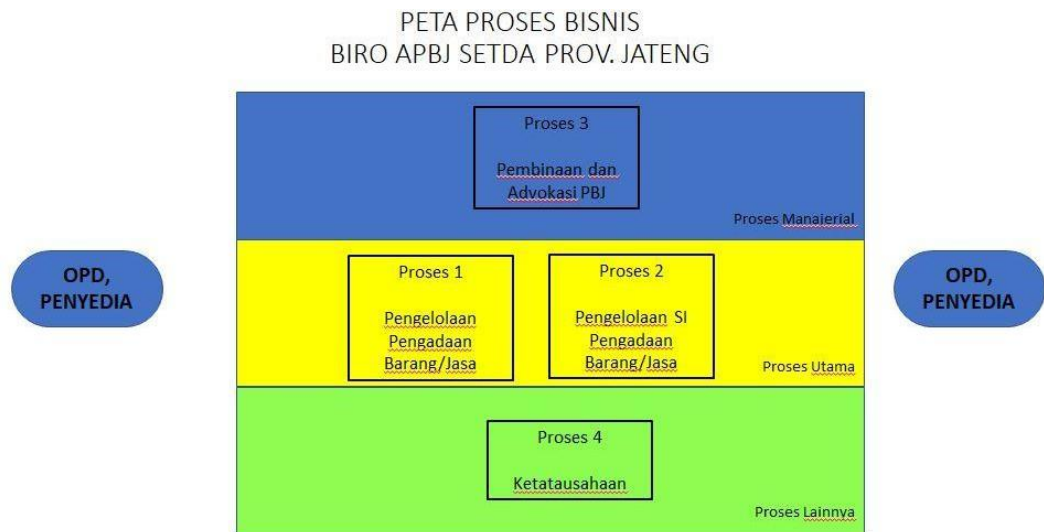
2. Peta Proses Bisnis

a. Kerangka Peta Proses Bisnis



Gambar 1.2 Kerangka Peta Proses Bisnis

b. Peta Proses Bisnis



Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis

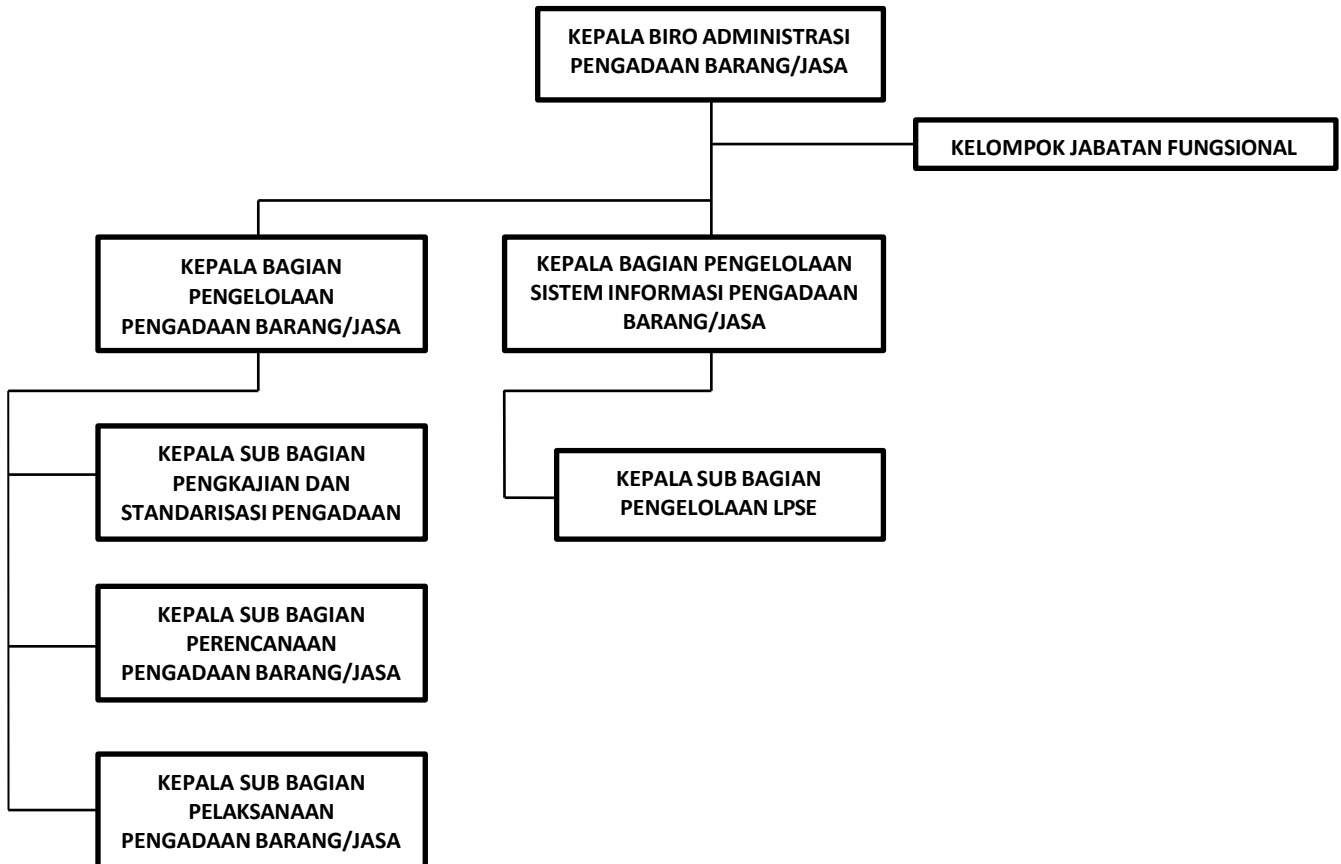
3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah masih berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021, terdiri dari:

- Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa;
- Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:

- 1) Subbagian Pengkajian Dan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Subbagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 3) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:
- 1) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.4 Struktur Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

I.3 Isu-Isu Strategis

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berbagai tugas dan fungsi guna mewujudkan efektivitas pelayanan pengadaan barang/jasa. Berikut permasalahan utama (strategic issued) pada lingkup Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Tata kerja pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa belum optimal;

2. Modernisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) masih belum optimal;
3. Sarana dan Prasarana Pendukung kinerja Pengadaan Barang/Jasa belum terpenuhi;
4. Kapasitas SDM, pembinaan kelembagaan, dan advokasi pengadaan barang/jasa perlu ditingkatkan;
5. Rawan adanya gratifikasi (KKN) dalam proses pengadaan barang/jasa yang berakibat tidak selesainya pekerjaan atau berlanjut dalam proses hukum.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

1. Susunan Kepegawaian :

Susunan Kepegawaian Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. Berdasarkan Jabatan :

Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	JFU	Jumlah
Kepala Biro	-	-	-	-	-	-
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	-	1	3	33	16	53
Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	-	1	1	2	8	12
Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	-	-	1	3	6	10
Jumlah Total	-	2	5	38	30	75

- b. Berdasarkan Pangkat/Golongan ruang :

Tabel 1.2
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Unit Kerja	Gol IV	Gol III	Gol II	Jumlah
Kepala Biro	-	-	-	-
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	8	41	4	53
Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	3	5	4	12

Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	2	8	-	10
Jumlah Total	13	54	8	75

c. Berdasarkan Pendidikan :

Tabel 1.3
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Unit Kerja	Doktoral / S3	Pasca Sarjana	Sarjana / D-4	Sarjana Muda	SMA/ SMK/ STM	SMP/ ST	Jml
Kepala Biro	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	-	12	38	-	3	-	53
Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	-	3	4	5	-	-	12
Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	1	4	3	2	-	-	10
Jumlah Total	1	19	45	7	3	-	75

d. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 1.4
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kepala Biro	-	-	-
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	41	12	53
Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	9	3	12
Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	7	3	10
Jumlah Total	57	18	75

2. Sarana dan Prasarana

Sementara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.Lemari Besi/Metal	5	Baik
2	Meubelair.Sice	1	Baik
3	Meubelair. Meja 1/2 Biro	5	Baik
4	Meubelair. Kursi Rapat	80	Baik
5	Alat Pendingin Lemari Es	1	Baik
6	Dispenser	7	Baik
7	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
8	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik
9	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	Baik
10	Kursi Rapat Kerja Eselon II	20	Baik
11	Peralatan Personal Komputer	1	Baik
12	Almari Besi Kaca Sorong 2 Pintu	1	Baik
13	Pendingin Ruangan (AC)	33	Baik
14	Almari Besi Kaca Sorong 4 Pintu	1	Baik
15	Almari Besi 2 Pintu	1	Baik
16	Almari Kayu 2 Pintu	1	Baik
17	Filling Cabinet	1	Baik
18	Meja Informasi	1	Baik
19	Meja Computer	1	Baik
20	Kursi Putar Manager	1	Baik
21	Kursi Tunggu isi 3	1	Baik
22	Kursi Tunggu Isi 4	1	Baik
23	Kursi rapat	1	Baik
24	LED TV 32 Inch	2	Baik
25	Printer Laserjet	1	Baik
26	Komputer PC	10	Baik
27	All in one PC	28	Baik
28	Macbook Pro Apple	1	Baik
29	Laptop Acer	1	Baik
30	Laptop Lenovo 9220	2	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
31	Laptop HP Spectre X360 13-AP0055TU	6	Baik
32	Printer Brother	1	Baik
33	Proyektor	18	Baik
34	LED TV 52 Inch	1	Baik
35	Kursi Kerja Eselon III dan IV	10	Baik
36	Kursi Eselon II	1	Baik
37	Printer Epson	1	Baik
38	Personal Komputer Desktop HP	5	Baik
39	Meja Kantor	1	Baik
40	Almari Pakaian	1	Baik
41	Printer DeskJet EPSON L3110	10	Baik
42	Laptop ACER Z3-451/8	3	Baik
43	Kursi Staf	20	Baik
44	Meja Komputer Orbitrend	10	Baik
45	Printer HP Laserjet Pro MFP M28A	6	Baik
46	Printer DeskJet EPSON L6160	1	Baik
47	Mobil Eselon	5	Baik
48	Sepeda Motor	2	Baik
49	Kamera	1	Baik
50	TV LED Samsung Flat Smart TV 65 INCH [UA65RU7100]	2	Baik
51	Portable AUDIO	1	Baik
52	Uninterruptable Power Supply	10	Baik
53	External Hardisk	2	Baik
54	Meja rapat	1	Baik
55	Sofa tamu	7	Baik
56	Kursi tamu	6	Baik
57	Buffet Pendek	2	Baik
58	Penarikan Jaringan Backbone & penataan jaringan internet	1	Baik
59	Laptop Thosiba 2013	9	Baik

3. Anggaran

Anggaran Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam upaya capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Program "Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa", mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 3.664.001.000,- (Tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta seribu rupiah).
- b. Program "Administrasi Umum", mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 400.999.000,- (empat ratus juta sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan LKj dan aspek strategis/isu strategis, keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan (merupakan penjabaran Visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah).

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan prioritas program dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja kantor serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.

1.6 Tindaklanjut atas laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023 khusus pada lingkup Biro-Biro Setda Provinsi Jawa Tengah dikompilasi dalam dokumen LKjIP Setda Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

NO	SARAN /REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	-	-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 - 2023.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen formal dalam sistem pemerintah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam memahami permasalahan dan tugas pokok dan fungsi serta dipengaruhi pula oleh kemampuan menerjemahkan sasaran dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis (Renstra).

1. Visi

Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018 – 2023 adalah

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, dijabarkan dalam empat misi, yaitu:

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;
- b. **Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;**
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan;
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Adapun secara khusus, peran utama Sekretariat Daerah yang eksistensinya berada dalam upaya meningkatkan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka secara khusus dapat juga diartikan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian misi kedua yaitu: **Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota.**

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Adapun tujuan yang akan dicapai Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dalam mewujudkan misinya yaitu **Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah.**

b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran mendasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, terdapat 1 (satu) sasaran untuk mewujudkan tujuan yaitu **Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,** dengan indikator kinerja yaitu **Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa.**

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Jangka Menengah
(Sebelum Perubahan)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	60	63	65	67	70

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Jangka Menengah
(Sesudah Perubahan)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	60	30	65	85	90

Target kinerja pada Biro APBJ mengalami perubahan yaitu pada tahun:

1. Tahun 2020

Perubahan target kinerja Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari semula 63 menjadi 30 dikarenakan adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran terhadap dampak Pandemi Covid-19.

2. Tahun 2022

Perubahan target kinerja Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari semula 67 menjadi 85 dikarenakan perubahan Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmen 050 tahun 2021, sehingga Renstra berubah dan target kinerja 2022 dan 2023 juga berubah.

3. Tahun 2023

Perubahan target kinerja Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari semula 70 menjadi 90 dikarenakan perubahan Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmen 050 tahun 2021, sehingga Renstra berubah dan target kinerja 2022 dan 2023 juga berubah.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Kinerja Tahun 2023 Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja .

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	90

Tabel 2.4 Arah Kebijakan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<p>Optimalisasi tata kerja pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa</p> <p>Optimalisasi pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM, pembinaan kelembagaan, dan advokasi pengadaan barang/jasa</p>	<p>1. Penguatan Kelembagaan Sekretariat Daerah;</p> <p>2. Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah;</p> <p>3. Peningkatan ketercukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah;</p> <p>4. Pengembangan Jejaring Manajemen Pembangunan Daerah, dan;</p> <p>5. Peningkatan sinergi dan efektifitas pembangunan daerah.</p>

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, tahun 2023 Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan kinerja di bawah ini:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	90

Adapun tujuan serta sasaran strategis diatas, diwujudkan dalam bentuk operasional melalui program dan kegiatan sebagai berikut yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6 Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa			3.664.001.000
		Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terasilitasi	90	
		Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	85	
		Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	93	
2	Program Administrasi Umum			400.999.000
		Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ	100	

2.4 Instrument Pendukung Capaian Kinerja

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan didukung beberapa aplikasi pendukung yaitu:

1. E-Controlling

Fungsi: Mengontrol realisasi dari perencanaan anggaran, pendapatan daerah dan mencatat laporan pergerakan realisasi anggaran.



Gambar 2.1 E-Controlling

(<https://econcontrolling.jatengprov.go.id/>)

2. E-Planning

Fungsi: Menyusun RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, dan tepat.



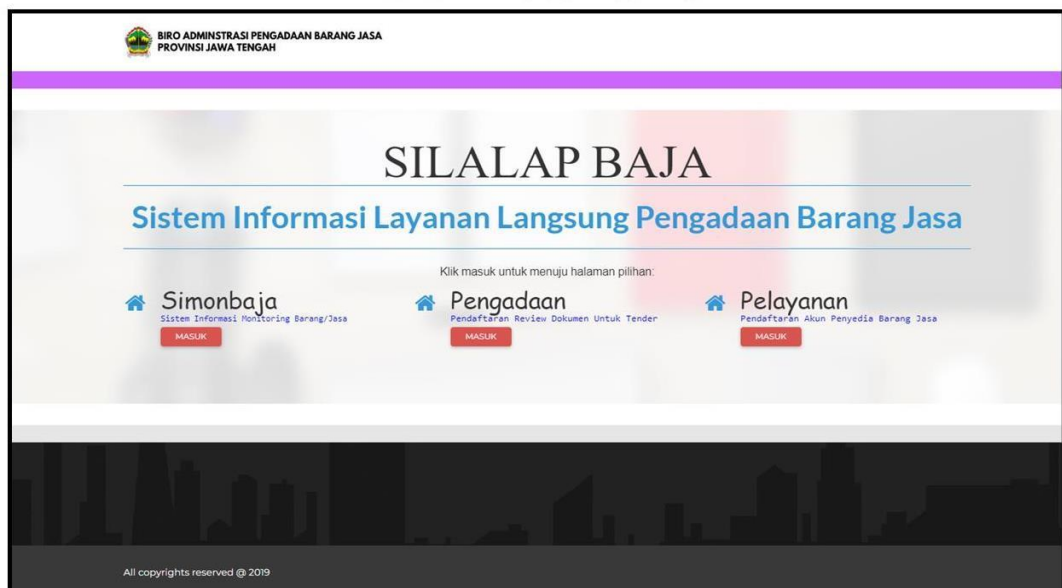
Gambar 2.2 E-Planning

(<https://eplanning.jatengprov.go.id/>)

3. SILALAP BAJA.

Fungsi:

- a. Modernisasi proses layanan administrasi pengadaan barang/jasa.
- b. Proses review dokumen tender SKPD.
- c. Pendaftaran akun SPSE penyedia baru.



Gambar 2.3 SILALAP BAJA

(<https://silalapbaja.biroapbj.jatengprov.go.id/>)

4. SiRUP Lokal

Fungsi:

- a. Mengakomodasi proses pemaketan pengadaan barang/jasa ke dalam SiRUP LKPP.
- b. Wujud transparansi perencanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- c. Memastikan metode pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Gambar 2.4 SiRUP Lokal
(<https://sirup.biroapbj.jatengprov.go.id/>)

5. E-Consult

Fungsi: Fasilitas konsultasi pengadaan barang/jasa untuk penyedia dan SKPD.



Gambar 2.5 E-Consult
(<http://konsultasi.biroapbj.jatengprov.go.id/>)

6. Blangkon Jateng

Fungsi:

- Mendorong UMK Go Digital, menjadikan pengadaan lebih inklusif, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
- Report progres transaksi Pemerintah Daerah, data penyedia dan data produk.



Gambar 2.6 Blangkon Jateng
[\(https://blangkonjateng.jatengprov.go.id/\)](https://blangkonjateng.jatengprov.go.id/)

7. SPSE

Fungsi:

- a. Wujud Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, baik yang dilakukan menggunakan Metode Tender dan Non-Tender.
- c. Pencatatan Pengadaan Non-Tender dan Swakelola.



Gambar 2.7 SPSE
<https://lpse.jatengprov.go.id/eproc4>

8. Sistem Informasi Monitoring Barang Jasa (SIMONBAJA)

Fungsi:

- a. Monitoring target dan realisasi proses pengadaan barang/jasa.
- b. Mengintegrasikan data perencanaan pengadaan barang/jasa dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), data pemilihan penyedia barang/jasa dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), serta data e-Purchasing dengan aplikasi E-Katalog dan Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah (Blangkon Jateng).
- c. Menampilkan data realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan alokasi paket pekerjaan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) yang diperoleh dari hasil input ekontrak di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).



Gambar 2.8 SIMONBAJA
(<https://monev.biroapbj.jatengprov.go.id/>)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja tahun 2023 adalah bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik dengan perhitungan:

$$Capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 100%;	Sangat Baik
2	85 – 100%	Baik
3	65 – 84,99%	Cukup
4	50 - 64,99%	Kurang
5	< 50,%	Sangat Kurang

Sebagai sebuah media pengukuran, skala ini digunakan untuk mengklasifikasi hasil pengukuran indikator kinerja. Meskipun hasil klasifikasi tersebut pada akhirnya menggambarkan keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran, namun pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, tapi sebagai informasi awal yang sangat menentukan bagi pengambil keputusan untuk membuat langkah-langkah yang solutif dan stratejik guna meningkatkan kinerja organisasi.

Pada tahun 2023, secara umum Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang diampu. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja yang harus diwujudkan yaitu:

Tabel 3.2 Sasaran Strategis dan Indikator

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi TW 4	Persentase	
1	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	90	92,53	102,81	90

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis TW IV Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW4	Capaian%	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	90	92,53	102,81	Sangat Baik	Biro APBJ

Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator kinerja “Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa” pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 telah mencapai 92,53% dengan kategori Sangat Baik.

2. Perbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 - 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian%
1	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	30	32	106,66	65	67,22	103,41	85	92,14	108,40	90	92,53	102,81

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator kinerja “Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa” pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 terhadap pencapaian tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan, dikarenakan adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran tetapi seluruhnya menunjukkan konsistensi hasil yang sama yaitu capaian kinerja telah mencapai 100% tiap tahunnya.

Tabel 3.5 Capaian Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2023	SAT	REALISASI							
				TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah										
a)	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah										
1	Nilai IKM Biro Pengadaan Barang dan Jasa	79	Angka	79	87	79	88	78.5	86.75	78.5	86.75

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Triwulan IV /Tahun 2023. mencapai realisasi 86,75% dari target 78,5% hal ini dapat diartikan bahwa Kepuasan masyarakat yang dinilai dari beberapa

indikator layanan yang diberikan Biro APBJ kepada pengguna layanan mendapatkan kategori Sangat Baik

3.2 EFISIENSI ANGGARAN

Pencapaian sasaran strategis suatu organisasi tidak lepas dari pemanfaatan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Oleh karena itu sistem perencanaan dan penganggaran merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam pembangunan. Hal ini karena dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis tentu saja memerlukan anggaran meskipun tidak selalu. Oleh karena itu perlu dievaluasi penggunaan anggaran apakah sudah efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Jumlah anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.065.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.990.940.840,- atau sebesar (98,18%), adapun Efisiensi Anggaran sebesar Rp. 74.059.160.000,- atau (1,82%), hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan honor tenaga teknis sebanyak 5 orang dikali 1 bulan yang tidak dapat dibayarkan karena 5 orang tersebut diterima menjadi tenaga P3K di Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi terhadap seluruh kegiatan tersebut, capaian fisiknya terlaksana 100%.

Tabel 3.6 Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2023

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)
			S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI		
			Rp	%		Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.065.000.000	4.065.000.000	100	548.150.537	3.990.940.840	98,18	-1,82
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	400.999.000	400.999.000	100	33.089.800	399.148.975	99,54	-0,46
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.999.000	400.999.000	100	33.089.800	399.148.975	99,54	-0,46
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	365.766.000	365.766.000	100	31.747.000	363.921.175	99,5	-0,5
a	Koordinasi dan Konsultasi Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	278.766.000	278.766.000	100	20.236.000	277.980.675	99,72	-0,28
b	Rapat-Rapat Koordinasi Internal Biro	87.000.000	87.000.000	100	11.511.000	85.940.500	98,78	-1,22
2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	35.233.000	35.233.000	100	1.342.800	35.227.800	99,99	-0,01
a	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	25.903.000	25.903.000	100	475.800	25.898.800	99,98	-0,02
b	Survei IKM Biro	3.644.000	3.644.000	100	0	3.644.000	100	0
c	Penataan Administrasi Kepegawaian	5.686.000	5.686.000	100	867.000	5.685.000	99,98	-0,02
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.664.001.000	3.664.001.000	100	515.060.737	3.591.791.865	98,03	-1,97
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.049.527.000	2.049.527.000	100	201.821.379	2.001.017.059	97,63	-2,37
1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	400.000.000	400.000.000	100	69.884.600	393.830.552	98,46	-1,54
a	FASILITASI PENYUSUNAN DAN KOORDINASI PERENCANAAN PBJ	180.285.000	180.285.000	100	17.731.600	180.141.552	99,92	-0,08
b	SOSIALISASI DAN PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMAKETAN PBJ	119.715.000	119.715.000	100	34.532.000	102.581.000	85,69	-14,31
c	FASILITASI PENYUSUNAN SHB	7.881.000	7.881.000	100	0	6.004.000	76,18	-23,82

d	FASILITASI TIM SHB	64.500.000	64.500.000	100	16.340.000	62.500.000	96,9	-3,1
e	RAKOR PENYUSUNAN SHB	27.619.000	27.619.000	100	1.281.000	42.604.000	154,2 6	54,26
2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **	1.334.200.000	1.334.200.000	100	78.801.979	1.311.702.163	98,31	-1,69
a	JUMLAH FASILITASI PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA-TENDER /SELEKSI/PENUNJUKAN LANGSUNG	922.550.000	922.550.000	100	49.830.479	915.224.613	99,21	-0,79
b	FASILITASITEKNIS EVALUASI KEWAJARAN HARGA, TKDN DAN PREFERENSI HARGA	77.450.000	77.450.000	100	2.480.000	77.199.150	99,68	-0,32
c	PENGLOLAAN E-KATALOG LOKAL	3.004.000	3.004.000	100	0	2.981.500	99,25	-0,75
d	RAKOR/KONSULTASI PENGLOLAAN E KATALOG LOKAL	16.110.000	16.110.000	100	900.000	15.304.000	95	-5
e	KOORDINASI/SUPERVISI PENGLOLAAN E KATALOG LOKAL	200.086.000	200.086.000	100	0	199.749.900	99,83	-0,17
f	FASILITASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI KATALOG ELEKTRONIK LOKAL JAWA TENGAH	24.550.000	24.550.000	100	4.000.000	24.292.000	98,95	-1,05
g	SOSIALISASI DAN EVALUASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)	34.740.000	34.740.000	100	5.875.000	24.985.000	71,92	-28,08
h	ASISTENSI 10 PROYEK STRATEGIS	55.710.000	55.710.000	100	15.716.500	51.966.000	93,28	-6,72
3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	315.327.000	315.327.000	100	53.134.800	295.484.344	93,71	-6,29
a	Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	100.039.000	100.039.000	100	597.800	91.195.800	91,16	-8,84
b	Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2022	55.749.000	55.749.000	100	350.000	56.049.000	100,5 4	0,54
c	Rakor Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa di Tahun 2023	69.340.000	69.340.000	100	43.986.000	58.380.000	84,19	-15,81
d	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	90.199.000	90.199.000	100	8.201.000	89.859.544	99,62	-0,38
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	920.000.000	920.000.000	100	217.480.958	908.225.426	98,72	-1,28
1	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	290.000.000	290.000.000	100	69.476.279	282.092.982	97,27	-2,73
a	FASILITASI SISTEM DAN LAYANAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SPSE	122.794.000	122.794.000	100	29.875.000	122.716.505	99,94	-0,06
b	FASILITASI SISTEM DAN LAYANAN - BIMTEK/WORKSHOP APLIKASI SPSE DAN APLIKASI PENDUKUNGNYA	69.322.000	69.322.000	100	18.658.500	68.446.977	98,74	-1,26
c	FASILITASI SISTEM DAN LAYANAN-PELAKSANAAN KEGIATAN LKPP/PEMANGKU KEPENTINGAN	33.298.000	33.298.000	100	4.310.779	32.944.674	98,94	-1,06
d	FASILITASI SISTEM DAN LAYANAN - PENINGKATAN KAPASITAS LPSE	64.586.000	64.586.000	100	16.632.000	57.984.826	89,78	-10,22
2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	450.000.000	450.000.000	100	113.757.579	448.228.344	99,61	-0,39
a	Update / Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	56.775.000	56.775.000	100	300.000	56.630.000	99,74	-0,26
b	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang dan Jasa agar berjalan optimal	174.514.000	174.514.000	100	61.297.800	174.508.800	100	0
c	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sistem Utama	58.205.000	58.205.000	100	23.099.779	58.158.609	99,92	-0,08
d	Identifikasi permasalahan dan Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	11.557.000	11.557.000	100	300.000	11.544.500	99,89	-0,11
e	Monitoring dan Evaluasi serta Pendampingan Program Blangkon Jateng	148.949.000	148.949.000	100	28.760.000	147.386.435	98,95	-1,05
3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	180.000.000	180.000.000	100	34.247.100	177.904.100	98,84	-1,16
a	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	70.000.000	70.000.000	100	5.308.800	69.576.300	99,39	-0,61
b	Publikasi dan dokumentasi informasi Pengadaan Barang dan Jasa	66.674.000	66.674.000	100	16.246.800	65.134.300	97,69	-2,31
c	Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa OPD dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	43.326.000	43.326.000	100	12.691.500	43.193.500	99,69	-0,31
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	694.474.000	694.474.000	100	95.758.400	682.549.380	98,28	-1,72
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	210.366.000	210.366.000	100	37.464.000	207.761.013	98,76	-1,24

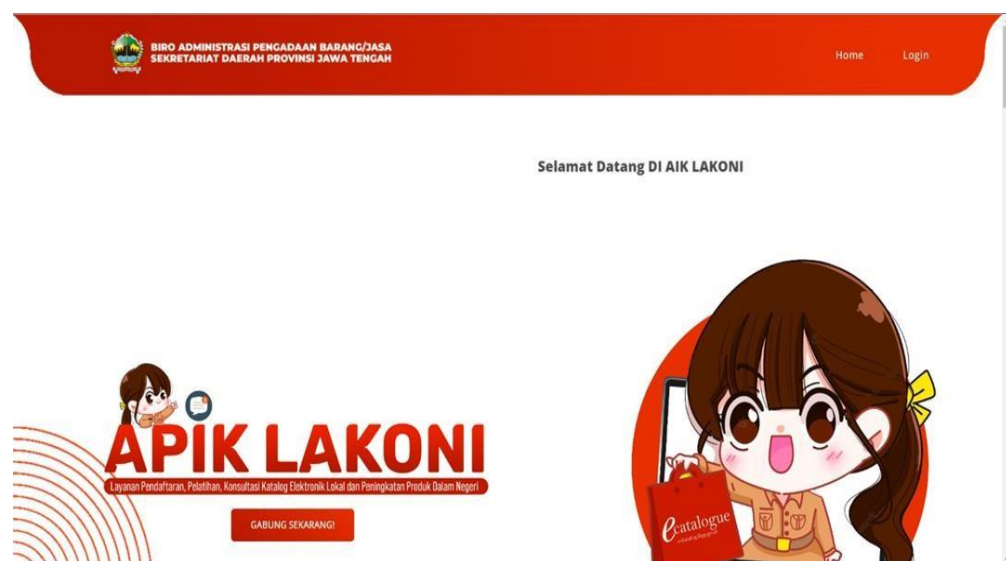
a	FASILITASI DUKUNGAN PEMBINAAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA	38.173.000	38.173.000	100	1.273.500	38.171.100	100	0
b	FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PENGADAAN BARANG/JASA	136.177.000	136.177.000	100	31.763.000	134.175.413	98,53	-1,47
c	FASILITASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JF PPBJ	36.016.000	36.016.000	100	4.427.500	35.414.500	98,33	-1,67
2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	246.481.000	246.481.000	100	30.547.300	243.406.267	98,75	-1,25
a	FASILITASI DUKUNGAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA	50.943.000	50.943.000	100	4.037.800	50.560.400	99,25	-0,75
b	PEMBINAAN UKPBJ KAB/KOTA	65.048.000	65.048.000	100	6.893.500	64.733.243	99,52	-0,48
c	DESK KEMATANGAN UKPBJ KAB/KOTA	79.300.000	79.300.000	100	17.405.000	77.250.624	97,42	-2,58
d	RAKOR UKPBJ KAB/KOTA	51.190.000	51.190.000	100	2.211.000	50.862.000	99,36	-0,64
3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	237.627.000	237.627.000	100	27.747.100	231.382.100	97,37	-2,63
a	Pendampingan Hukum	178.674.000	178.674.000	100	20.813.500	174.229.500	97,51	-2,49
b	KORSUBGAH/ STRANAS PK	35.400.000	35.400.000	100	6.739.600	34.482.600	97,41	-2,59
c	Pembinaan Hukum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	23.553.000	23.553.000	100	194.000	22.670.000	96,25	-3,75

3.3 INOVASI

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mendukung terwujudnya reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi yang termasuk dalam 10 Program Unggulan Gubernur Jawa Tengah, melakukan inovasi sebagai berikut:

➤ Aplikasi APIK LAKONI

APIK LAKONI merupakan Aplikasi berbasis website untuk pendaftaran layanan konsultasi dan pelatihan Katalog Elektronik Lokal di Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah bagi para pelaku usaha baik yang berupa badan usaha maupun perseorangan.



Gambar 3.1 APIK LAKONI
(<https://apik-lakoni.biroapbj.jatengprov.go.id>)

3.4 PENGHARGAAN

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada bulan Oktober Tahun 2023 memperoleh penghargaan sebagai Provinsi Dengan Transaksi Pengadaan Terbanyak Melalui Toko Daring dalam ajang **Indonesia Internasional Sustainable Procurement Expo (I2SPE)** Tahun 2023 sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 3.2 Award 2023
Indonesia Internasional Sustainable Procurement Expo (I2SPE)

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa secara umum Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Sasaran Strategis dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan kategori "Sangat Baik". Hal ini didukung dengan data yaitu Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan indikator kinerja "Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa" telah tercapai 92,53 dari target 90%, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.990.940.840,00 dan Efisiensi Anggaran sebesar Rp. 74.059.160,00.

4.2 Rekomendasi

Perlunya dilakukan pencermatan terhadap usulan - usulan kebutuhan anggaran dalam rangka mengakomodir kegiatan-kegiatan Prioritas Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah sehingga target –target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.